KABUPATEN BOGOR
ISTIMEWA & GEMILANG
KUTA UDAYA WANGSA

DISDUKCAPIL
KABUPATEN BOGOR

# L K I P

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## TAHUN 2025




(021) 8758419

disdukcapil@bogorkab.go.id

# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diselesaikan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan kinerja ini menyajikan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 beserta analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor secara umumnya.

Kami selaku manusia menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu masukan dan saran perbaikan sangat kami hargai untuk penyempurnaan penyusunan laporan ini dimasa yang akan datang.

Akhirnya semoga Allah SWT meridhoi dan Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

Cibinong, 28 Januari 2025

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOGOR

RENALDI YUSHAB FIANSYAH, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196909061988031001

# DAFTAR ISI

**Halaman**


**Kata Pengantar** ..... i

**Daftar Isi** ..... iii

**Daftar Tabel/Diagram** ..... iV

**Lampiran-lampiran** ..... vi

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Maksud dan Tujuan ..... 3

C. Tugas dan Fungsi ..... 3

D. Struktur Organisasi ..... 5

**BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 6**

A. Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 . ..... 6

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... 8

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..... 11**

A. Capaian KInerja ..... 11

B. Indeks Kepuasan Masyarakat ..... 13

C. Realisasi Anggaran ..... 21

**BAB IV PENUTUP ..... 25**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance)* terdapat 3 landasan utama yang harus di miliki yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2025 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2025, sehingga Laporan Kinerja merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2025 kepada Bupati Bogor, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Laporan Kinerja tahun 2025. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

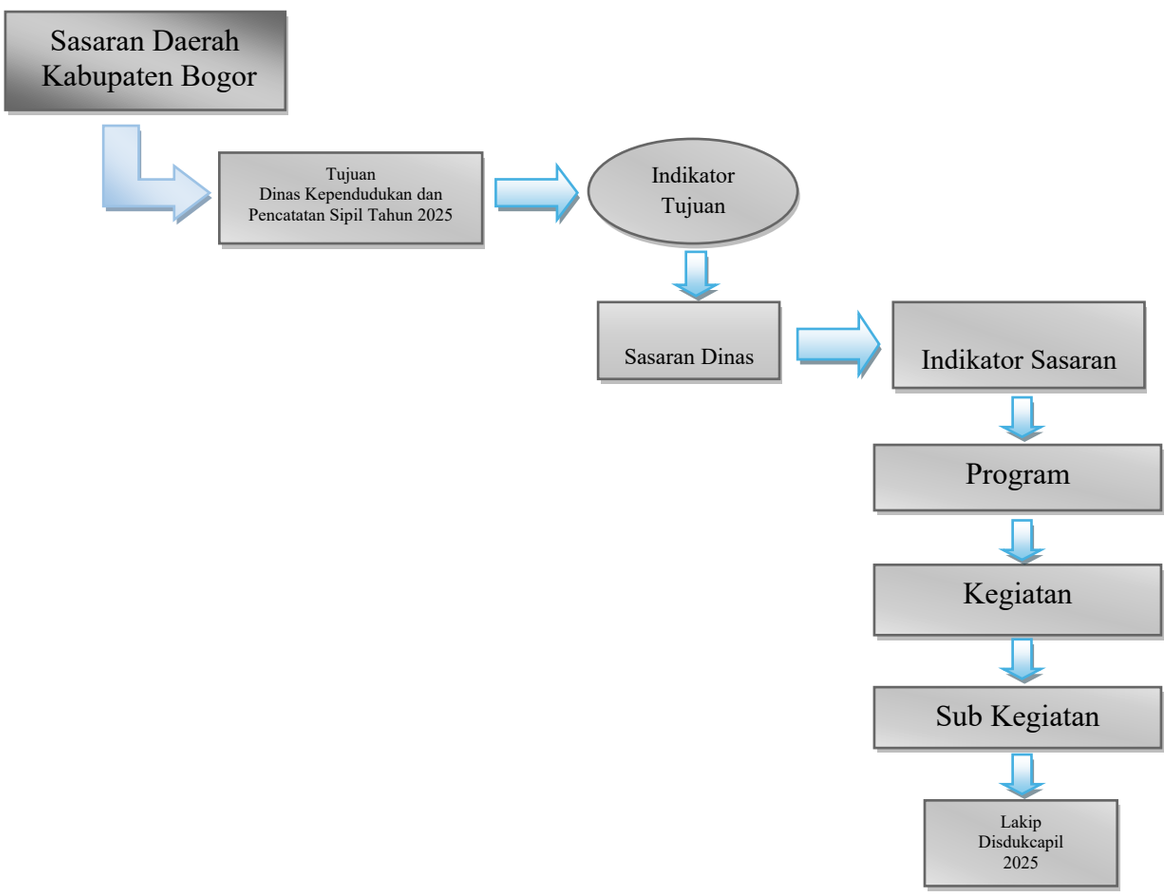
untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2025.

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2025. Indikator Kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran *(output)* dan indikator hasil *(outcome)* sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025.

Gambaran pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2025, disajikan dalam diagram 1.1.

**Diagram 1.1**

**Pengukuran Kinerja**



Metode penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusuan Laporan Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini adalah sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas Kinerja dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025. Laporan Kinerja ini membantu pimpinan serta seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencermati berbagai permasalahan juga sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan Penilaian Kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder, dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan laporan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2025.

## C. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

**Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi**

**1. Tugas Pokok**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas pembantuan.

**2. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan di bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
4) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5) Pelaksanaan Administrasi Dinas;
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**3. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :

1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat, membawahi;
    a. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
    b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    c. Sub Bagian Keuangan.
3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi;
    a. Kelompok Substansi Identitas Penduduk; dan
    b. Kelompok Substansi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi;
    a. Kelompok Substansi Pencatatan Kelahiran dan Kematian; dan

b. Kelompok Substansi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.

5) Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), membawahi:

a. Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan

b. Kelompok Substansi Pengelola dan Penyajian Data Kependudukan;

6) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi:

a. Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan

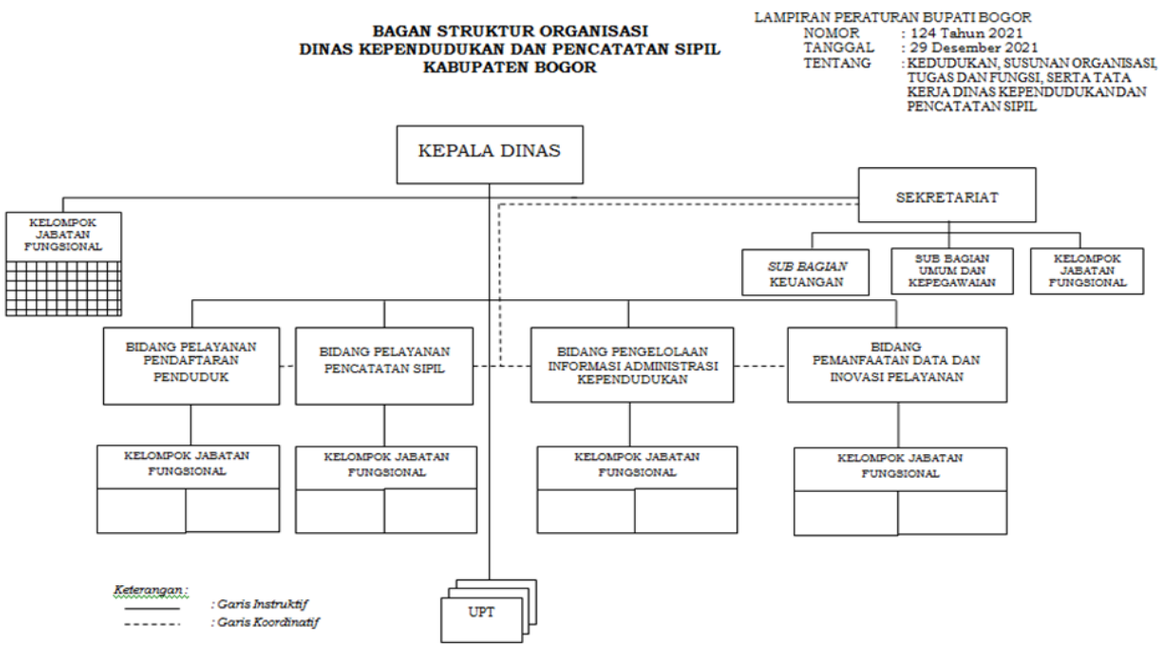
b. Kelompok Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

7) 7 UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipili:

## D. Struktur Organisasi

Secara lengkap susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil digambarkan dalam Diagram 1.2

**Diagram 1.2**
**Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
**Kabupaten Bogor**



# BAB II

# PERENCANAAN DAN OERJANJIAN KINERJA

## A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disusun untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Rencana Strategis harus memuat tujuan, sasaran dan program yang juga mempertimbangkan masukan-masukan dari stakeholders.

Perumusan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didasarkan pada tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah tahun 2025-2029 yaitu tujuan ke-1 **" Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan"** dengan Sasaran " **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, dan terintegrasi"** sehingga segala daya upaya, kemampuan SDM dan anggaran diarahkan pada tujuan dan sasaran diatas. Berdasarkan tujuan dan sasaran Perubahan RPD yang telah dirumuskan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu **"Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan",** dengan indikator :

### 1. Cakupan Layanan Adminduk;

**Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada sasaran dan tujuan pembangunan daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah:

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD yang telah dirumuskan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029 merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

***Tujuan:*** *" Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan"*

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan maka untuk menjaga konsistensi dan keterkaitan dengan tujuan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan sasaran dalam Renstra tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**Sasaran:**

1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

   - Indikator Sasaran

     Persentase kepemilikan dokumen kependudukan ;

     Persentase kepemilikan dokumen kependudukan adalah persentase jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan, yaitu KTP-el, KK, Akta Lahir, dan KIA

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminitsrasi Kependudukan;

   - Indikator Sasaran

     Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adminduk ;

     Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Adminduk adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan. IKM ini didapatkan dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif.

**Tabel 2.1**
**Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra**
**Tahun 2025-2029**

| SASARAN DAERAH | TUJUAN | SASARAN | | INDIKATOR | | SATUAN | TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, terintegrasi dan berbasis digital | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan | | | | Cakupan Layanan Adminduk | % | 78,50 | 80,75 | 81,74 | 84,17 | 85,70 |
| | | 1 | Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | 1 | Persentase kepemilikan dokumen kependudukan | % | 78,50 | 80,75 | 81,74 | 84,17 | 85,70 |

| SASARAN DAERAH | TUJUAN | SASARAN | | INDIKATOR | | SATUAN | TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminitsrasi Kependudukan | 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adminduk | Poin | 88,24 | 89,36 | 90,21 | 91,09 | 91,98 |

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Perjanjian Kinerja (JANKIN) Tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi yang ditandatangani Kepala Dinas dan diketahui oleh Kepala Daerah. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 disusun sesuai DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dan dilakukan perubahan sesuai DPPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator outcome berikut target kinerjanya, indikator output berikut target kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025.

Sesuai dengan DPPA tahun 2025, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025, tercantum dalam belanja daerah (belanja program/kegiatan/sub. kegiatan) dengan jumlah sebesar Rp. 62,226,067,175,-.

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 disajikan pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2**
**Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Cakupan Layanan Adminduk | % | 78.50 |
| 2 | Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan | % | 78.50 |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 88.24 |

| No. | Program | Anggaran (Rp) | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 1. | Program Pendaftaran Penduduk | 15.775.446.446 | APBD |
| 2. | Program Pencatatan Sipil | 3.627.069.907 | APBD |
| 3. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 3.133.762.333 | APBD |
| 4. | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 51.984.750 | APBD |
| 5. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 39.637.803.739 | APBD |

# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Kinerja Pelayanan. Pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## A. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor

1. Sasaran : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

   Indikator : Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan

**Sasaran**

**Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**

**Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan**

**CAPAIAN 2025**

**99,57**

**PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA**

| REALISASI 2024 | PENINGKATAN REALISASI |
|---|---|
| 76,54 | 1,62 |
| CAPAIAN 2024 | PENURUNAN CAPAIAN |
| 92,15 | 7,42 |

**PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA**

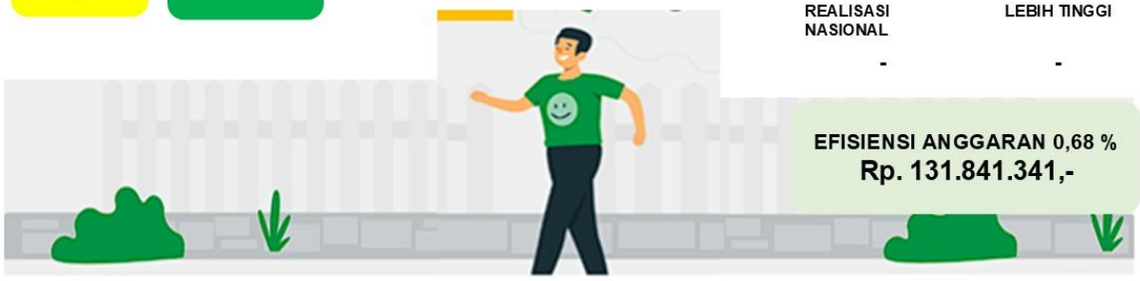
| Target Akhir Renstra 2030 | Capaian terhadap Target akhir Renstra |
|---|---|
| 87,63 | 89,19 |

**TARGET** 78,50

**REALISASI** 78,16

**PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL**

| REALISASI NASIONAL | LEBIH TINGGI |
|---|---|
| - | - |



**EFISIENSI ANGGARAN 0,68 %**
**Rp. 131.841.341,-**

**FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN**

| | |
|---|---|
| 1 | Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk |
| 2 | Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil |

**REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2026**

| REALISASI 2025 | TARGET 2026 | |
|---|---|---|
| 78,16 | 80,75 | Target Tetap |

**UPAYA PERBAIKAN INTERVENSI (CONTINUOUS IMPROVEMENT)**

- Pendekatan Pelayanan Melalui Penambahan Jenis Layanan Baru yaitu KTP, KIA dan Akta Kelahiran dan Kematian di 40 Kecamatan
- Pengembangan Aplikasi Pendukung Layanan Melalui Penyempurnaan Mekanisme Ticketing Anterian Layanan
- Akselerasi Peningkatan Cakupan Dokumen Kependudukan Melalui Kerjasama dengan Instansi Terkait Seperti, Disdik, Dinsos Dll

**PROGRAM TERKAIT**

- PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
- PROGRAM PENCATATAN SIPIL

**TREN PERKEMBANGAN**



Kabupaten Bogor tetap berkomitmen untuk Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Hal ini ditandai Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan hampir mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 99,57% dari target sebesar 78,50 dan terealisasi sebesar 78,16. Realisasi Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan sebesar 78,16 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk wajib dokumen di Kabupaten Bogor telah memiliki dokumen administrasi kependudukan yang sah dan tercatat dalam database kependudukan nasional. Capaian ini mencerminkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan serta efektivitas strategi pelayanan yang telah dilaksanakan.

Dilihat pada aspek realisasi, Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan ini meningkat sebesar 1,64 dari tahun 2024 sebesar 76,54 menjadi 78,16 pada tahun 2025. Dari segi pencapaian kinerja, Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan mengalami peningkatan sebesar 7,42 yaitu dari capaian sebesar 92,15 pada tahun 2024 menjadi 99,57 pada Tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan 2025 ini lebih tinggi 7,71 yaitu dari rata rata realisasi 2022-2024 sebesar 74,39 di bandingkan dengan realisasi 2025 sebesar 82,10.

Dalam periode tahun 2022 hingga tahun 2025, rata rata kenaikan Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan sebesar 3,03 dan dari segi perencanaan jangka menengah, Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2025 sudah mencapai batas aman yaitu mencapai 89,58 dari target sebesar 87,63 dan terealisasi 89,19.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan antara lain Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk, serta Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil.

1. **Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk,** yang mendorong Keberhasilan dalam meningkatkan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk

(seperti Kartu Keluarga, KTP-el, Kartu Identitas Anak, dan surat pindah) dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis yang dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi

2. **Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil,** yang didukung Keberhasilan dalam meningkatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil merupakan hasil dari strategi yang terencana, dukungan regulasi yang kuat, serta peningkatan kualitas pelayanan yang berkelanjutan



Dalam rangka pencapaian target Tahun 2026 yang ditingkatkan menjadi 78,50, diperlukan penguatan pembinaan secara lebih intensif, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi administrasi kependudukan, serta optimalisasi layanan administrasi kependudukan guna memastikan seluruh masyarakat memenuhi tertib administrasi kependudukan. Program yang mendukung pencapaian indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan meliputi Program Pendaftaran Penduduk, dan Program Pencatatan Sipil telah tergambar pada faktor-faktor keberhasilan sebagaimana diuraikan di atas. Adapun efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis diatas sebesar 0,68% atau setara dengan Rp 131.841.341. Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp 19.402.516.353 dan terealisasi sebesar Rp 19.270.675.012. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja pada indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2025

## B. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adminduk

2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminitsrasi Kependudukan

   Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adminduk

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adminduk merupakan Total nilai persepsi responden per parameter dikalikan dengan bobot total parameter yang terisi dalam penghitungan survey kepuasan masyarakat. Dimana pencapaian realisasi dalam penghitungan indek kepuasan masyarakat, sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan, kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat mempengaruhi peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Adapun capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan adminduk pada tahun 2025 tergolong sangat baik dengan capaian kinerja 99,57% dari target sebesar 78,50% terealisasi sebesar 78,16%.

**Sasaran**

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminitsrasi Kependudukan**

**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adminduk**

**CAPAIAN 2025**

**99,84**

**PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA**

| REALISASI 2024 | PENINGKATAN REALISASI |
|---|---|
| 86,98 | 1,12 |
| CAPAIAN 2024 | PENURUNAN CAPAIAN |
| 106,07 | 6,23 |

**PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA**

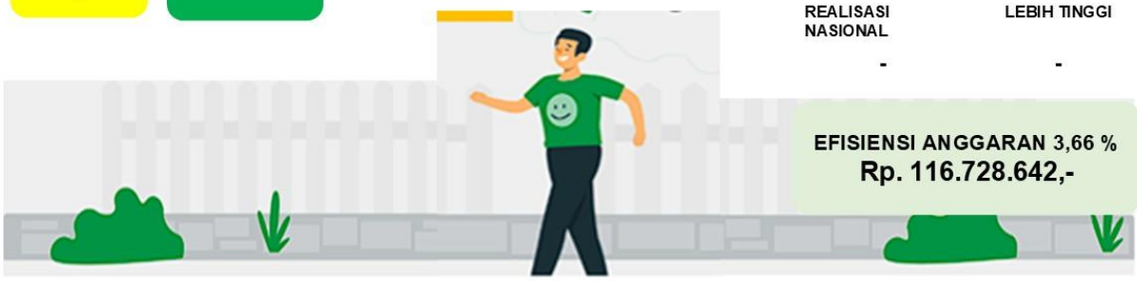
| Target Akhir Renstra 2030 | Capaian terhadap Target akhir Renstra |
|---|---|
| 92,55 | 95,19 |

**TARGET** 88,24

**REALISASI** 88,10

**PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL**

| REALISASI NASIONAL | LEBIH TINGGI |
|---|---|
| - | - |



**EFISIENSI ANGGARAN** 3,66 %
**Rp. 116.728.642,-**

**FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN**

| | |
|---|---|
| 1 | Meningkatnya Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan |
| 2 | Penyajian Profil Kependudukan sesuai ketentuan |

**REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2026**

| REALISASI 2025 | TARGET 2026 | |
|---|---|---|
| 88,10 | 89,36 | Target Tetap |

**UPAYA PERBAIKAN INTERVENSI (CONTINUOUS IMPROVEMENT)**

- Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
- Pengembangan Inovasi Layanan Berbasis Digital
- Penguatan Pengelolaan Pengaduan dan Evaluasi Layanan
- Peningkatan Kapasitas SDM dan Tata Kelola

**PROGRAM TERKAIT**

- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
- PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

**TREN PERKEMBANGAN**




Kabupaten Bogor tetap berkomitmen untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Adminitsrasi Kependudukan. Hal ini ditandai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap

Pelayanan Adminduk hampir mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 99,84 dari target sebesar 88,24 dan terealisasi sebesar 88,10, di lihat pada aspek realisasi, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adminduk ini mengalami kenaikan sebesar 1,12 dari tahun 2024 sebesar 86,98 menjadi 88,10 pada tahun 2025. Dari segi pencapaian kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adminduk mengalami penurunan sebesar 6,23 yaitu dari capaian sebesar 106,07 pada tahun 2024 menjadi 99,84 pada Tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adminduk 2025 ini lebih tinggi 5,27 yaitu dari rata rata realisasi 2022-2024 sebesar 82,83 di bandingkan dengan realisasi 2025 sebesar 88,10.

Dalam periode tahun 2022 hingga tahun 2025, rata rata kenaikan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adminduk sebesar 29,71 dan dari segi perencanaan jangka menengah, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adminduk Tahun 2025 sudah mencapai batas aman yaitu mencapai 95,34 dari target sebesar 92,55 dan terealisasi 95,19.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adminduk dalam Kondisi Baik antara lain Meningkatnya Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan serta Penyajian Profil Kependudukan sesuai ketentuan.

1. **Meningkatnya Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adminduk dalam kondisi baik.**

Kondisi meningkatnya penyajian dan pemanfaatan data kependudukan menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam tata kelola administrasi kependudukan, khususnya dalam aspek akurasi, keterpaduan, dan aksesibilitas data. Data kependudukan yang disajikan secara berkala dan sistematis telah dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat daerah dan pemangku kepentingan sebagai dasar perencanaan

pembangunan, penyaluran bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta program strategis lainnya.

2. **Penyajian Profil Kependudukan sesuai ketentuan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adminduk.**

   Keberhasilan penyajian Profil Kependudukan sesuai ketentuan berkontribusi langsung terhadap meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan disajikan secara sistematis memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan dan kepercayaan publik.





Dalam rangka menjaga keberlanjutan capaian dan mendukung target Tahun 2026 sebesar 89,36 dengan kategori target tetap, Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pengelola data dalam aspek analisis, validasi, dan penyajian informasi statistik kependudukan agar data tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga informatif dan strategis untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Penyajian profil kependudukan secara tepat waktu dan sesuai standar menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi kualitas layanan.

Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adminduk dalam Kondisi Baik yaitu Program Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan. Analisis rinci mengenai kontribusi program terhadap keberhasilan indikator tergambar pada faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana telah diuraikan di atas. Adapun efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis diatas sebesar 1,10% atau setara dengan Rp 248.569.983. Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp 22.588.263.436 dan terealisasi sebesar Rp 22.339.693.453.

Dengan demikian, capaian IKM tahun 2025 tidak hanya menjadi bukti adanya usaha untuk meningkatkan implementasi kebijakan pelayanan publik, tetapi juga menjadi motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan pada tahun-tahun mendatang demi mewujudkan pelayanan adminduk yang prima, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

**1. Permasalahan atau Hambatan**

Adapun permasalahan pokok terkait pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah masih perlunya peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik pada administrasi kependudukan, sehingga permasalahan tersebut melebar pada belum optimalnya pelayanan terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, belum optimalnya pengolahan dan penyajian data kependudukan serta masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan yang dilaksanakan dengan instansi lain. Hal tersebut memunculkan akar masalah seperti masih belum optimalnya inovasi terkait pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil, terbatasnya cakupan layanan pendaftaran penduduk, masih kurangnya kerjasama dan koordinasi antara Dinas dengan Kecamatan dan Desa terkait pelayanan pendaftaran penduduk, adanya hambatan waktu dan jarak tempuh dalam pengajuan penerbitan akta catatan sipil khususnya penduduk yang berdomisili di kecamatan yang jauh dari gedung kantor Dinas, adanya penerapan SIAK Terpusat, pembatasan hak akses pemanfaatan data dan masih kurangnya sosialisasi dan kerjasama dengan instansi lain terkait pemanfaatan data.

## 1. Informasi atau Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis penyerapan realisasi anggaran per sasaran strategis dilakukan untuk mengetahui seberapa besar realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah dicapai dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Tahun 2025. Realisasi penyerapan anggaran per-sasaran strategis disajikan dalam table dibawah ini :

| No. | Uraian | Efisiensi Anggaran (Rp) | Persentase Efisiensi Anggaran (%) |
|---|---|---|---|
| **A.** | **UTAMA** | | |
| 1. | Program Pendaftaran Penduduk | 115.819.393 | 0,73 |
| 2. | Program Pencatatan Sipil | 16.021.948 | 0,44 |
| 3. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 116.677.495 | 3,72 |
| 4. | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 51.147 | 0,10 |
| **B.** | **PENUNJANG** | | |
| 5. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1.025.549.502 | 2,59 |
| **TOTAL** | | 1.274.119.485 | 2,05 |

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025 efisiensi anggaran dari capaian sasaran strategis sebesar 2,05% atau setara Rp. 1.274.119.485,-. Adapun efisiensi anggaran pada tahun 2025 tersebut diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. 62.226.067.175,- dan terealisasi sebesar Rp. 60.951.947.690,-. Alasan terjadinya efisiensi anggaran pada tahun 2025 yaitu adanya selisih penawaran dan efisiensi harga.

## 2. Informasi atau Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berbagai program dan kegiatan strategis telah dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan. Program-program tersebut tidak hanya fokus pada peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat sistem pelayanan yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Untuk meningkatkan Cakupan Layanan Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tahun 2025 didukung oleh 4 (empat) program utama antara lain :

a. Program Pendaftaran Penduduk, memiliki 2 Indikator kinerja program yaitu Cakupan penerbitan KTP dan Cakupan Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki KIA, pada tahun 2025 realisasi kinerja program ini sebesar 70,61% dari target sebesar 78,50%, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 99,01%.

b. Program Pencatatan Sipil, Indikator kinerja program ini yaitu Cakupan penerbitan akta kelahiran anak, tahun 2025 realisasi kinerja program ini sebesar 93,26% dari target sebesar 94,09%, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 99,12%.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, ada 2 Indikator kinerja program ini yaitu Persentase Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, tahun 2025 realisasi kinerja program ini sebesar 100% dari target sebesar 100%, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 100%.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Indikator kinerja program ini yaitu Persentase Penyajian Profil Kependudukan Yang Sesuai Dengan Pedoman Penyusunan, tahun 2025 realisasi kinerja program ini sebesar 100% dari target sebesar 100%, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 100%.

### 3. Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor

Reallisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 62.226.067.175,- terealisasi sebesar Rp. 60.951.947.690,- atau 97,95%. Rekapitulasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 3.7**
**Rincian Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025**

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2025 | REALISASI 2025 | % 2025 | REALISASI 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| | | | | | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | **62.226.067.175,00** | **60.951.947.690,00** | **97,95** | **59.169.743.114,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **40.625.958.860,00** | **39.821.592.386,00** | **98,02** | **38.169.723.614,00** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 13.899.950.544,00 | 13.470.355.026,00 | 96,91 | 13.490.648.097,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.726.008.316,00 | 26.351.237.360,00 | 98,60 | 24.679.075.517,00 |
| | **JUMLAH BELANJA OPERASI** | **40.625.958.860,00** | **39.821.592.386,00** | **98,02** | **38.169.723.614,00** |
| | | | | | |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **21.600.108.315,00** | **21.130.355.304,00** | **97,83** | **21.000.019.500,00** |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.600.108.315,00 | 19.364.443.725,00 | 98,80 | 19.634.192.000,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2.000.000.000,00 | 1.765.911.579,00 | 88,30 | 1.365.827.500,00 |
| | **JUMLAH BELANJA MODAL** | **21.600.108.315,00** | **21.130.355.304,00** | **97,83** | **21.000.019.500,00** |
| | | | | | |
| | **JUMLAH BELANJA** | **62.226.067.175,00** | **60.951.947.690,00** | **97,95** | **59.169.743.114,00** |
| | | | | | |
| | **SURPLUS/DEFISIT** | **(62.226.067.175,00)** | **(60.951.947.690,00)** | **97,95** | **(59.169.743.114,00)** |
| | | | | | |

Anggaran belanja operasi dan belanja modal yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai IKU Tujuan dan IKU sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025.

# BAB IV

# PENUTUP

Secara keseluruhan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berhasil memenuhi dua Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada periode pelaporan. Indikator pertama, yaitu persentase kepemilikan dokumen kependudukan, telah tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Capaian ini didukung oleh optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan layanan jemput bola, serta pemanfaatan sistem pelayanan berbasis digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini tercermin dari mayoritas permohonan dokumen kependudukan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Pencapaian tersebut didukung oleh peningkatan kinerja aparatur, penguatan pengawasan internal, serta penyederhanaan alur pelayanan, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas, namun demikian untuk Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan Clean Governance. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Mewujudkan optimalisasi penerapan Digitalisasi Pelayanan Kependudukan melalui penyediaan Aplikasi pendukung berbasis Web yaitu Jaringan Pelayanan Terintegrasi dan Sistem Layanan Online Kependudukan;
2. Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penyelenggaraan berbagai layanan Inovasi, khususnya penambahan layanan KTP-el, Akta Lahir, dan KIA;
3. Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui Kerjasama perluasan akses-akses pelayanan pada berbagai instansi

pelayanan publik seperti Rumah Sakit, Puskesmas, KUA hingga tingkat Desa dan Kelurahan;

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke lapangan untuk mengetahui progres dan kendala yang dihadapi dalam tahapan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga akan memudahkan dalam pengambilan kebijakan/solusi.
5. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar bidang maupun dengan stakeholder dalam peningkatan kinerja dan penyerapan anggaran.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ini dapat memberi masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2025 secara tepat waktu.

**KEPALA DINAS**
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
**KABUPATEN BOGOR**

**RENALDI YUSHAB FIANSYAH, S.Sos**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 196909061988031001**